



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINANG**

Jalan Jend. Sudirman – Selindung Baru Pangkalpinang ☎ (0717) 424524

KATA PENGANTAR

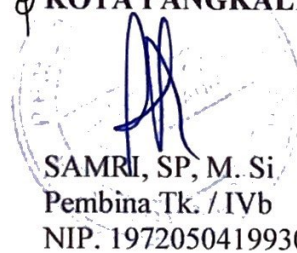
Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Renja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan selama periode 2024-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian. Dokumen Renja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

Dokumen Renja ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2025). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang pada akhir tahun anggaran 2025. Demikian dokumen Rencana Kerja ini disusun, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Renja ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan potensi di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Perkebunan dan Holtikultura serta Peternakan.

Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Pangkalpinang, 25 Maret 2024

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINANG**


SAMRI, SP, M. Si
Pembina Tk. / IVb
NIP. 197205041993031006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.1.1Pengertian Renja	1
1.1.2. Proses Penyusunan Renja.....	2
1.2Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	9
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD..	9
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
3.1Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	12
3.2 Tujuan dan Sasaran OPD.....	12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	13
BAB V PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang menyusun Dokumen Rencana Kerja 2025.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan daerah tiga tahunan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan pertanian dan ketahanan pangan. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

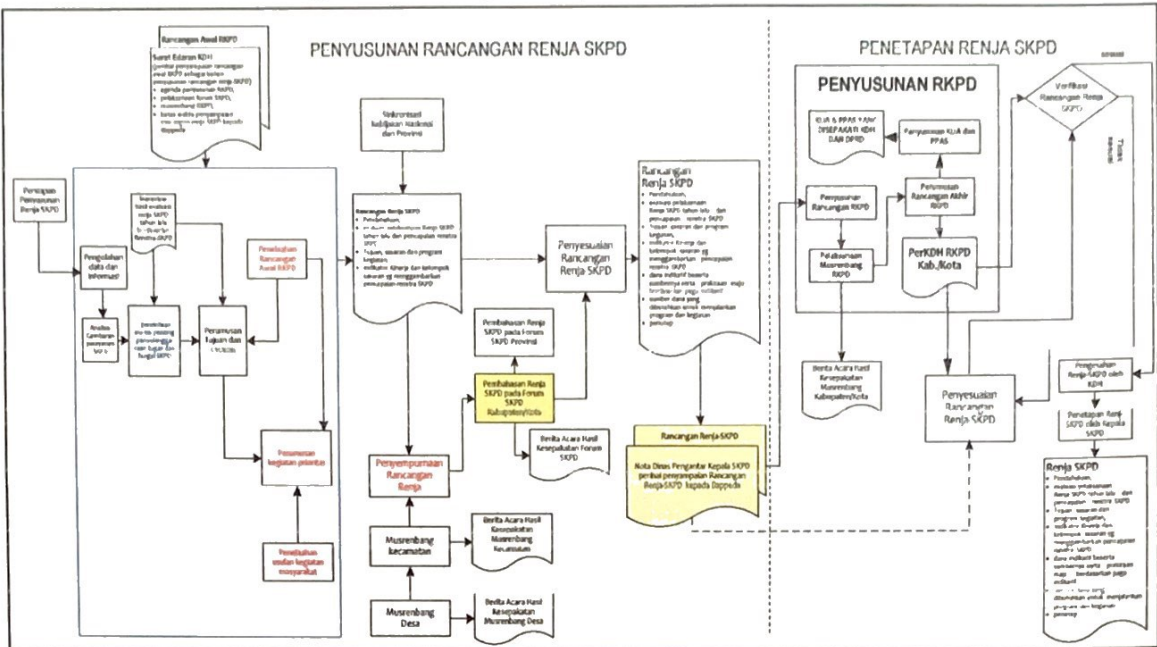
Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Operasional Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor)

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pangan dan Pertanian memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris dengan dua Subbagian
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian PEP dan Keuangan
- C. Bidang Ketahanan Pangan; dengan tiga Seksi
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi pangan
 - b. Seksi Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Seksi Keamanan Pangan
- D. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura; dengan tiga Seksi

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
 - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan
- E. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tiga Seksi
- a. Seksi Pembibitan dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesmavet dan PP
- F. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari
- a. UPT. Rumah Potong Hewan (RPH) dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPT. Pusat Kesehatan Hewan dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPT. Perbibitan dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- a. Penyuluh Pertanian Pelaksana
 - b. Penyuluh Pertanian Pertama
 - c. Penyuluh Pertanian Utama

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, Peternakan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Ketahanan Pangan, TPPH, Peternakan serta mempermudah

melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah :

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2025 meliputi

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III	Tujuan dan Sasaran
	Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup
	Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan saran dan tujuan.

1. Evaluasi Renja Program Tahun 2023 (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di bidang pangan, pertanian dan peternakan yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam pelayanan pembangunan pangan dan pertanian.

2.2.1 Kekuatan

- 1) Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal ini Kota Pangkalpinang untuk membangun dan melaksanakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai;
- 4) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.

2.2.2 Kelemahan

- 1) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
- 2) belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya;
- 3) Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya.

2.2.3 Peluang

- 1) Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah sehingga dapat bersaing dipasar domestic dan global;
- 3) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha;
- 4) Pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan budidaya tanaman yang baik dan produk yang baik dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

2.2.4 Tantangan

- 1) Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman penduduk menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen dan produktifitas pertanian;
- 2) Usaha pertanian dalam konteks budidaya tanaman memiliki resiko yang cukup tinggi sebagai akibat dari perubahan cuaca dan iklim, dan perubahan musim, akan berdampak pada peningkatan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) seperti serangan hama dan penyakit serta menurunnya kualitas pemeliharaan, sehingga mengakibatkan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya;
- 3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi seperti masih rendahnya investasi yang menggunakan potensi komoditas unggulan dan sumberdaya daerah, rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah, belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal, dan masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
- 4) Terbatasnya lahan pertanian yang luas menyebabkan pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani perlu lebih dioptimalkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang harus mengacu pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang agar tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan sehingga pencapaian tujuan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tercapai.

3.2 Tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari Renstra Dinas Pangan dan Pertanian merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang, tujuan yang akan dicapai antara lain :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian”

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sedangkan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
2. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan
3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2025 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut : Adapun Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 (terlampir).

V. PENUTUP

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan dengan adanya Rancangan awal (Ranwal) ini dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang penyusunannya dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026, serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2023, kedepan diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

 **KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG**
SAMRI, SP, M. Si
NIP. 197205041993031006

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2025

Tujuan PD	SasaranPD /sasaran program/kegiatan/sub kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							target	Rp	
							11	12	
1	2		4	5	6	7			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian	Proyeksi Target 2024-2026 mengacu pada realisasi dari Hasil Publikasi BPS "Pangkalpinang Dalam Angka"	%	3,35	9.448.240.269	Kepala Dinas
	Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan			Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Jumlah produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	ton	5084,555		Kepala Dinas
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP	Nilai	71,63	7.513.573.869	SEKRETARIS
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	72		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	-	Subkoordinator Kasubbag PEP dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	2	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	2	-	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	3	-	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	5.325.633.369	Subkoordinator Kasubbag PEP dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang	46	5.325.633.369	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	5	-	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Laporan	5	-	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin asn tahun berkenaan dikurangi jumlah pelanggaran disiplin asn tahun lalu di bagi jumlah pelanggaran disiplin asn tahun lalu dikali 100	%	25	77.259.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	1	77.259.000	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %	%	100	535.451.500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	3.993.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	255.329.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	53.339.500	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	42.790.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	180.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	0	177.199.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1	-	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	9	177.199.000	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %	100	100	1.172.631.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	124.100.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	56.100.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	992.431.000	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	100	225.400.000	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	6	225.400.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	-	
BIDANG PANGAN									
	Menigkatnya Skor Pola Pangan Harapan			Skor Pola Pangan Harapan	skor PPH dihitung dari komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu / tahun tertentu	Skor	90		KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	Angka konsumsi energi kota pangkalpinang dibagi standar angka konsumsi energi (2.150 kkal/kap/hari) x 100%	%	92	285.435.000	BIDANG KETAHANAN PANGAN
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyelesaian dokumen penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	35.438.000	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Prdusen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Laporan	3	35.285.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Dokumen	3	153.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)

			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	249.997.000	Subkoordinator Konsumsi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Dokumen	3	153.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Laporan	3	249.844.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu x 100 %	%	100	79.690.500	BIDANG KETAHANAN PANGAN
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	79.690.500	Subkoordinator Keamanan Pangan (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pangan Muda)
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	59.840.500	
			Penyediaan Sarana Pengujian dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	19.850.000	
	Menigkatnya Ketersediaan Pangan Utama			Ketersediaan Pangan Utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) / Jumlah penduduk tahun berkenaan x 100 %	%	90		KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x 100 %	%	35	349.099.000	BIDANG KETAHANAN PANGAN
			Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase penyelesaian dokumen peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	820.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		Dokumen	3	820.000	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	348.279.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	348.279.000	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan			Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Jumlah produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	ton		5.054	KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah sarana pertanian yang ada x100%	%	90	20.000.500	BIDANG TPPH
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang diawasi / jumlah sarana pertanian yang tersedia x100%	%	75	20.000.500	Subkoordinator Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan)
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi		laporan	1	20.000.500	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana pertanian yang ada x 100%	%	100	24.998.000	BIDANG TPPH
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	24.998.000	Subkoordinator Produksi, Pengolahan, dan Periasaran (Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda)
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		Dokumen	8	24.998.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan dibagi jumlah kelompok petani x 100%	%	30	416.982.000	BIDANG TPPH
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan di bina dibagi jumlah kelembagaan yang terdata x 100%	%	75	416.982.000	Subkoordinator Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda)
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		unit	1	246.982.000	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		unit	8	170.000.000	

			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan(t) dikurang jumlah kejadian/kasus penyakit tanaman tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit tanaman tahun sebelumnya (t-1) x 100%	%	50	14.980.000	BIDANG TPPH
			Pengendali dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah kawasan pertanian yang terkendali dari penyakit/kasus dibagi jumlah kawasan pertanian yang ada x100%	%	100	14.980.000	Sub koordinator Perbenihan dan Perlindungan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mude)
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		hektar	7	14.980.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN									
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penjaminan Peredaran BENIH/BIBIT TERNAK	Jumlah peredaran benih/bibit ternak yang dijamin dibagi jumlah benih/bibit ternak yang ada x100%	%	75	255.137.100	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keberhasilan mutu dan peredaran benih /bibit ternak	jumlah keberhasilan benih bibit / jumlah bibit yang beredar x100 %	%	62	73.038.600	Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda)
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Laporan	1	73.038.600	
			Pengendali dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah	Persentase benih/ bibit ternak yang beredar	jumlah kelahiran dibagi jumlah bibit/ benih yang beredar x100 %	%	65	60.217.500	
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		Laporan (ekor)	1(80)	60.217.500	Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda)
				Persentase terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Terkendali / jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan tersedia	%	83	121.881.000	
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		laporan (ton)	1	121.881.000	Kepala UPTD Perbibitan

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana pertanian yang ada x100%	%	100	165.541.900	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana peternakan yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	jumlah prasarana peternakan yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana peternakanyang ada x100%	%	100	165.541.900	Kepala UPTD RPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Unit	1	165.541.900	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan(t) dikurang jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	%	84	322.802.400	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyakit Hewan menular dibagi jumlah penyakit hewan menular yang tertanani x100%	%	80	50.000.000	Sub koordinator kesehatan hewan (medik Veteriner Muda)
			Pemberantasan Penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam (1) satu daerah Kab	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Laporan	1	50.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner dibagi jumlah pasien x 100%	%	92	199.996.500	Kepala UPT Puskesmas
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Laporan	1	199.996.500	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan/jumlah pengawasan unit di bagi jumlah hewan dan produk hewan/jumlah unit x 100 %	%	86	72.805.900	
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Laporan	1	7.809.000	Subkoordinator kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran (medik Veteriner Muda)
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Laporan	1	64.996.900	Subkoordinator kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran (medik
Pagu Total								9.448.240.269	

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Tujuan PD	SasaranPD /sasaran program/kegiatan/sub kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2		4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian	Proyeksi Target 2024-2026 mengacu pada realisasi dari Hasil Publikasi BPS "Pangkalpinang Dalam Angka"	%	3,32	8.429.906.488	3,35	8.976.214.252	3,41	9.122.522.015	3,41	26.528.642.755	Kepala Dinas
	Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan			Produktivitas komoditi tanaman pangan,hortikultura,perkebunan dan peternakan	Jumlah produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	ton	5053,887		5084,56		5131,15		5131,152	0	Kepala Dinas
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP	Nilai	71,62	7.285.806.604	71,63	7.851.991.868	71,64	7.875.565.218	71,64	7.875.565.218	SEKRETARIS
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	70		72		73		73	0	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	2.400.000	Subkoordinator Kasubag PEP dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	200.000	2	200.000	2	200.000	6	600.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	2	200.000	2	200.000	2	200.000	6	600.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	2	200.000	2	200.000	2	200.000	6	600.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	3	200.000	3	200.000	3	200.000	9	600.000	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	5.844.956.488	100	6.074.438.018	100	6.272.765.218	100	18.192.209.724	Subkoordinator Kasubag PEP dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50	5.844.556.488	50	6.074.088.018	50	6.272.365.218	50	18.191.009.724	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	5	200.000	5	200.000	5	200.000	15	600.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Laporan	5	200.000	5	200.000	5	200.000	15	600.000	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dikurangi jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu dibagi jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu dikali 100	%	30	75.000.000	25	100.000.000	20	120.000.000	20	295.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	1	75.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	3	295.000.000	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %	%	100	202.150.116	100	272.000.000	100	292.000.000	100	766.150.116	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000	3	10.500.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	30.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	3	155.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	3	78.000.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	3	67.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	125.650.116	1	160.000.000	1	170.000.000	3	455.650.116	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	100	146.900.000	0	393.426.234	0	200.000.000	100	740.326.234	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0	-	1	393.426.234	0	-	1	393.426.234	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	1	146.900.000	0	-	0	-	1	146.900.000	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %	100	100	803.000.000	100	787.000.000	100	810.000.000	100	2.400.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	131.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	3	341.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	22.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	3	79.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	650.000.000	1	660.000.000	1	670.000.000	3	1.980.000.000	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	100	213.000.000	100	224.277.616	100	180.000.000	100	617.277.616	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	6	149.000.000	6	174.277.616	6	180.000.000	6	503.277.616	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	64.000.000	1	50.000.000	0	-	2	114.000.000	
BIDANG PANGAN															
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan			Skor Pola Pangan Harapan	skor PPH dihitung dari komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu / tahun tertentu	Skor	90		90		90		90		KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	Angka konsumsi energi kota pangkalpinang dibagi standar angka konsumsi energi (2.150 kkal/kap/hari) x 100%	%	90	66.000.000	92	57.000.000	94	48.000.000	94	171.000.000	BIDANG KETAHANAN PANGAN

			Penyediaan dan Penyaluran Pangan /Jokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyelesaian dokumen penyediaan dan penyaluran pangan pokok/atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	2.000.000	100	2.030.000	100	3.000.000	100	7.000.000	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Laporan	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	9	3.500.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Dokumen	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	9	3.500.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	64.000.000	100	55.000.000	100	45.000.000	100	164.000.000	Subkoordinator Konsumsi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Dokumen	3	1.000.000	3	1.000.000	3	2.000.000	9	4.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Laporan	3	63.000.000	3	54.000.000	3	43.000.000	9	160.000.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu x 100 %	%	100	54.250.000	100	70.000.000	100	6.000.000	100	130.250.000	BIDANG KETAHANAN PANGAN
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	54.250.000	100	70.000.000	100	6.000.000	100	130.250.000	subkoordinator Keamanan Pangan (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pangan Muda)
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	24.250.000	3	50.000.000	3	3.000.000	9	77.250.000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	30.000.000	3	20.000.000	3	3.000.000	9	53.000.000	
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama		Ketersediaan Pangan Utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) / Jumlah penduduk tahun berkenaan x 100 %	%	90		90		90		90		KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x 100 %	%	35	80.750.000	35	26.000.000	35	31.300.000	35	138.050.000	BIDANG KETAHANAN PANGAN
			Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase penyelesaian dokumen peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	5.000.000	100	1.030.000	100	1.300.000	100	7.300.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		Dokumen	3	5.000.000	3	1.000.000	3	1.300.000	9	7.300.000	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	75.750.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	130.750.000	subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Muda)
			Pelaksanaan Pengedien, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengedien, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	75.750.000	3	25.000.000	3	30.000.000	9	130.750.000	

	Meningkatnya Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan			Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Jumlah produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	ton	4.870,13	5.054	5.054	5.054	5053,887	KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah sarana pertanian yang ada x100%	%	90	10.000.000	90	10.500.000	90	31.000.000	BIDANG TPPH
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian:	Jumlah sarana pertanian yang diawasi / jumlah sarana pertanian yang tersedia x100%	%	70	10.000.000	75	10.500.000	80	31.000.000	Subkoordinator Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda)
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	1	10.000.000	1	10.500.000	1	31.000.000		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana pertanian yang ada x 100%	%	100	9.000.000	100	9.500.000	100	28.500.000	BIDANG TPPH
			Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %	%	100	9.000.000	100	9.500.000	100	28.500.000	Subkoordinator Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran (Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda)
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	8	9.000.000	8	9.500.000	8	28.500.000		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan dibagi jumlah kelompok petani x 100%	%	20	185.000.000	30	185.000.000	40	683.656.797	BIDANG TPPH
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan dibina dibagi jumlah kelembagaan yang terdata x 100%	%	70	185.000.000	75	185.000.000	80	683.656.797	Subkoordinator Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda)
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	1	180.000.000	1	180.000.000	1	665.656.797		
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	5	5.000.000	8	5.000.000	10	18.000.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan(t) dikurang jumlah kejadian/kasus penyakit tanaman tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit tanaman tahun sebelumnya (t-1) x 100%	%	85	5.000.000	90	5.500.000	100	16.500.000	BIDANG TPPH
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pertanian yang terkendali dari penyakit/kasus dibagi jumlah kawasan pertanian yang ada x100%	%	100	5.000.000	100	5.500.000	100	16.500.000	Sub koordinator Perbenihan dan Perlindungan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda)
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	hektar	7	5.000.000	7	5.500.000	7	16.500.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN													
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penjaminan Peredaran BENIH/BIBIT TERNAK	Jumlah peredaran benih/bibit ternak yang dijamin dibagi jumlah benih/bibit ternak yang ada x100%	%	70	246.000.000	75	256.000.000	76	772.000.000	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan

			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase keberhasilan mutu dan peredaran benih /bibit ternak	Jumlah keberhasilan benih bibit / jumlah bibit yang beredar x100 %	%	60	15.000.000	62	18.000.000	64	20.000.000	64	53.000.000	Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda)
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Laporan	1	15.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	3	53.000.000	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah	Persentase benih/ bibit ternak yang beredar	Jumlah kelahiran dibagi jumlah bibit/ benih yang beredar x100 %	%	60	15.000.000	65	18.000.000	70	20.000.000	70	53.000.000	
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		ekor	75	15.000.000	80	18.000.000	80	20.000.000	80	53.000.000	Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda)
				Persentase terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Terkendali / Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan tersedia	%	82	216.000.000	83	220.000.000	84	230.000.000	84	666.000.000	
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		Ton	10	216.000.000	12	220.000.000	14	230.000.000	14	666.000.000	Kepala UPTD Perbibitan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana pertanian yang ada x100%	%	100	255.099.884	100	260.722.384	100	300.000.000	100	815.822.268	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana peternakan yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah prasarana peternakan yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana peternakan yang ada x100%	%	100	255.099.884	100	260.722.384	100	300.000.000	100	815.822.268	Kepala UPTD RPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Unit	1	255.099.884	1	260.722.384	1	300.000.000	1	815.822.268	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan(t) dikurang jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	%	82	233.000.000	84	244.000.000	86	251.500.000	86	728.500.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyakit Hewan menular dibagi jumlah penyakit hewan menular yang tertangani x100%	%	75	4.000.000	80	5.000.000	85	5.500.000	85	14.500.000	Sub koordinator kesehatan hewan (medik Veteriner Muda)
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Laporan	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	3	14.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner dibagi jumlah pasien x 100%	%	90	210.000.000	92	220.000.000	94	225.000.000	94	655.000.000	Kepala UPT Puskesmas
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Laporan	1	210.000.000	1	220.000.000	1	225.000.000	3	655.000.000	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan/jumlah pengawasan unit di bagi jumlah hewan dan produk hewaa/jumlah unit x 100 %	%	85	19.000.000	85	19.000.000	87	21.000.000	87	59.000.000	

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Pangan Dan Pertanian
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							7		8		9		10						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100	7.775.890.532	100	1.131.800.417	100	2.242.091.142	100	1.877.128.358	100	1.978.522.048	100	7.229.541.965	100	92,974	Sekretaris
				Perasetase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		0		100		100		Sekretaris
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretaris
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretaris
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretaris
2		020901202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	5.559.598.451	1	969.713.556	1	1.932.762.319	2	1.111.738.463	3	1.064.696.612	3	5.078.910.950	100	91,354	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3		020901202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	55	5.559.598.451	50	969.713.556	50	1.932.762.319	50	1.111.738.463	55	1.064.696.612	55	5.078.910.950	100	91,354	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							6		7		8		9						
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4		020901206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	655.029.178	1	23.767.730	2	72.147.156	3	45.253.488	4	500.633.867	4	641.802.241	100	97,981	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5		020901206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	6.499.000	1	639.000	1	0	0	0	1	5.239.422	1	5.878.422	100	90,451	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6		020901206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	424.938.250	0	0	0	0	0	0	1	415.667.000	1	415.667.000	100	97,818	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7		020901206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	31.628.160	1	6.623.750	1	2.905.000	0	2.941.050	1	16.024.000	1	28.493.800	100	90,090	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8		020901206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	18.915.000	1	4.200.000	1	0	0	3.500.000	1	11.130.000	1	18.830.000	100	99,551	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9		020901206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	173.048.768	1	12.304.980	1	69.242.156	0	38.812.438	1	52.573.445	1	172.933.019	100	99,933	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10		020901207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100	511.445.000	0	0	0	0	100	497.230.000	0	1.445.000	100	498.675.000	100	97,503	Kasubbaq Umum dan Kepegawaian
				Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1		0		0		1		1		1		100		KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11		020901207002	Pengadsan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	15	511.445.000	0	0	0	0	14	497.230.000	15	1.445.000	15	498.675.000	100	97,503	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						I		II		III		IV			11			12	
						1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12		020901208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	755.105.204	1	120.919.515	2	182.023.743	3	166.206.983	3	246.498.634	3	715.648.875	100	94,775	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		020901208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	108.620.000	1	23.776.347	1	23.461.491	1	17.487.231	1	36.931.498	1	101.656.567	100	93,589	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		020901208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	26.401.500	0	0	1	2.500.000	1	6.425.000	1	12.480.000	1	21.405.000	100	81,075	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		020901208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	620.083.704	1	97.143.168	1	156.062.252	1	142.294.752	1	197.087.136	1	592.587.308	100	95,566	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
16		020901209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	294.712.699	1	17.399.616	1	55.157.924	1	56.699.424	1	165.247.935	1	294.504.899	100	99,929	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		020901209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	5	192.511.696	1	17.399.616	2	55.157.924	4	56.699.424	5	63.046.932	5	192.303.896	100	99,892	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		020901209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	102.201.003	0	0	0	0	0	0	1	102.201.003	1	102.201.003	100	100	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	92,974		
PREDIKAT KINERJA																ST	ST		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV								
						7		8		9		10						11		12
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
19	-	020903	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas konsumsi pangan yang di ndi kasi kan oleh skor pola pangan harapan (PPH) (Dengan Satuan:%)	90	533.980.000	60	3.570.000	62	6.650.000	80	0	90	511.022.055	90	521.242.055	100	97,615	Bidang Ketahanan Pangan	
20		020903201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Laporan)	3	1.000.000	1	0	1	450.000	2	0	3	500.000	3	950.000	100	95	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
21		020903201001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dengan Satuan:Laporan)	3	500.000	0	0	2	225.000	2	0	3	250.000	3	475.000	100	95	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
22		020903201004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)	5	500.000	2	0	3	225.000	3	0	5	250.000	5	475.000	100	95	Sub Koordinator Konsumsi Pangan	
23		020903204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Dengan Satuan:Laporan)	2	532.980.000	1	3.570.000	2	6.200.000	2	0	2	510.522.055	2	520.292.055	100	97,619	Sub Koordinator Konsumsi Pangan	
24		020903204001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	5	500.000	0	0	0	0	5	0	5	470.000	5	470.000	100	94	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
25		020903204002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	3	532.480.000	2	3.570.000	3	6.200.000	3	0	0	510.052.055	3	519.822.055	100	97,623	Sub Koordinator Konsumsi Pangan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100,000	97,615	
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
						I		II		III		IV								
						1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13	
26	-	020904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pengadaan cadangan pangan (Dengan Satuan:%)	100	459.228.000	25	0	25	0	25	0	100	430.991.249	100	430.991.249	100	93,851	Bidang Ketahanan Pangan	
27		020904201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.000.000	1	0	0	0	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	100	100	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
28		020904201001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000	2	0	0	0	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	100	100	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
29		020904202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	457.228.000	0	0	0	0	1	0	1	428.991.249	1	428.991.249	100	93,824	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
30		020904202002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	457.228.000	0	0	0	0	1	0	1	428.991.249	1	428.991.249	100	93,824	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100,000	93,851	
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST	
31	-	020905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (Dengan Satuan:%)	90	54.403.650	20	0	80	10.368.000	90	435.000	90	42.638.596	90	53.441.596	100	98,232	Bidang Ketahanan Pangan	
32		020905201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2	54.403.650	1	0	2	10.368.000	2	435.000	2	42.638.596	2	53.441.596	100	98,232	Sub Koordinator Keamanan Pangan	
33		020905201004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	36.403.650	1	0	3	1.480.000	3	435.000	3	34.038.596	3	35.953.596	100	98,764	Sub Koordinator Keamanan Pangan	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34		020905201005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	18.000.000	1	0	3	8.888.000	95,750	0	3	8.600.000	3	17.488.000	100	97,156	Sub Koordinator Keamanan Pangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	98,232	
PREDIKAT KINERJA																	ST	ST	
35	-	032702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktifitas pertanian per hektar per tahun (Dengan Satuan:%)	100	242.060.472	25	25.400.312	40	45.100.468	90	41.413.174	100	121.046.624	100	232.960.578	100	96,241	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura
				Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Dengan Satuan:%)	30		15		10		25		30		30		100		Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura
36		032702201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian (Dengan Satuan:unit)	9	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.850.000	0	8.850.000	0	98.333	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
				Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	1		0		1		1		1		1		100		Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
37		032702201001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.000.000	0	0	1	0	1	0	100	8.850.000	100	8.850.000	100	98.333	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
38		032702202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Genetik(SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:orang)	5	47.396.992	0	7.257.232	0	12.885.848	0	10.885.848	0	15.264.464	0	46.293.392	0	97,672	UPTD Perbibitan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						6		7		8		9					10		11
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		100		UPTD Perbibitan
39		032702202001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Dengan Satuan:VUB)	1	47.396.992	1	7.257.232	1	12.885.848	1	10.885.848	1	15.264.464	1	46.293.392	100	97,672	UPTD Perbibitan
40		032702203	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data hewan ternak dan produk ternak (Dengan Satuan:data)	5	4.000.000	0	0	0	0	0	2.677.500	0	1.180.000	0	3.857.500	0	96,438	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
				Jumlah laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:laporan)	1		0		1		1		1		1		100		Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran
41		032702203001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.000.000	0	0	1	0	1	2.677.500	1	1.180.000	1	3.857.500	100	96,438	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
42		032702205	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Person)	6	181.663.480	0	18.143.080	0	32.214.620	0	27.849.826	0	95.752.160	0	173.959.686	0	95,759	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2		1		1		1		2		2		100		Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							6		7		8		9						
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
43		032702205001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Dengan Satuan:Ekor)	75	5.000.000	0	0	0	0	75	2.200.000	75	2.537.000	75	4.737.000	100	94,740	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran
44		032702205005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Dengan Satuan:Ton)	40	176.663.480	10	18.143.080	20	32.214.620	30	25.649.826	40	93.215.160	40	169.222.686	100	95,788	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	96,241		
PREDIKAT KINERJA																ST	ST		
45	-	032703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasaranan pertanian (Dengan Satuan:%)	80	49.114.000	20	0	0	3.500.000	75	0	80	45.447.000	80	48.947.000	100	99,660	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura
				Persentase penyediaan bibit ternak yg berkualitas (Dengan Satuan:%)	20		5	0	5	20	20		20		100			Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura	
46		032703201	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.114.000	1	0	1	3.500.000	1	0	1	447.000	1	3.947.000	100	95,941	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
47		032703201001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.114.000	0	0	1	3.500.000	1	0	1	447.000	1	3.947.000	100	95,941	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
48		032703203	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	45.000.000	0	0	1	0	1	0	1	45.000.000	1	45.000.000	100	100	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran
49		032703203002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Dengan Satuan:Laporan)	1	45.000.000	0	0	1	0	1	0	1	45.000.000	1	45.000.000	100	100	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	99,660		
PREDIKAT KINERJA																ST	ST		
50	-	032704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan (Dengan Satuan:%)	100	653.972.402	30	45.543.392	40	96.702.788	80	211.342.278	100	280.941.389	100	634.529.847	100	97,027	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
51		032704201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.425.000	1	0	1	0	1	223.000	1	4.200.000	1	4.423.000	100	99,955	Seksi Kesehatan Hewan
52		032704201001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.425.000	1	0	1	0	1	223.000	1	4.200.000	1	4.423.000	100	99,955	Sub Koordinator Kesehatan Hewan
53		032704203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	70	304.246.334	0	16.514.464	0	32.611.446	0	128.786.496	0	117.867.253	0	295.779.659	0	97,217	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
				Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		100		UPTD Pusat Kesehatan Hewan
54		032704203002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	1	304.246.334	1	16.514.464	1	32.611.446	1	128.786.496	1	117.867.253	1	295.779.659	100	97,217	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
55		032704204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	2	345.301.068	1	29.028.928	1	64.091.342	2	82.332.782	2	158.874.136	2	334.327.188	100	96,822	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
56		032704204001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	1	88.100.000	1	0	1	0	1	12.750.000	1	67.426.000	1	80.176.000	100	91,006	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8					9	10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
57		032704204002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan Laporan)	1	257.201.068	1	29.028.928	1	64.091.342	1	69.582.782	1	91.448.136	1	254.151.188	100	98,814	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	97,027		
PREDIKAT KINERJA																ST	ST		
58	-	032705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	100	3.435.000	0	0	0	0	80	2.455.000	100	0	100	2.455.000	100	71,470	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura
59		032705201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:laporan)	1	3.435.000	0	0	0	0	1	2.455.000	1	0	1	2.455.000	100	71,470	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
60		032705201001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Dengan Satuan Ha)	7	3.435.000	0	0	0	0	7	2.455.000	7	0	7	2.455.000	100	71,470	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	71,470		
PREDIKAT KINERJA																ST	S		
61	-	032707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:%)	100	313.051.172	25	26.150.312	60	46.225.468	80	42.275.468	100	177.215.524	100	291.866.772	100	93,233	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura
62		032707201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:laporan)	2	313.051.172	1	26.150.312	1	46.225.468	2	42.275.468	2	177.215.524	2	291.866.772	100	93,233	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
63		032707201001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	1	190.223.172	1	26.150.312	1	46.225.468	1	42.275.468	1	67.469.424	1	182.120.672	100	95,741	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
64		032707201002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	40	122.828.000	0	0	0	0	5	0	40	109.746.100	40	109.746.100	100	89,349	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
						I		II		III		IV			12						
						6		7		8		9			10			11			
1	2	3	4	5	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		13
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	93,233				
PREDIKAT KINERJA																ST	ST				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																100,000	93,367				
PREDIKAT KINERJA																ST	ST				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- sudah sesuai antara angaran dan kegiatan																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- sudah tidak ada yang menghambat																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Sudah melakukan kegiatan yang sesuai triwulan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Sudah melakukan kegiatan yang sesuai tahapan penyusunan renja																	
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 23-04-2024 KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG  SAMRI, SP, M.Si NIP.197205041993031006																					



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan. Jenderal Sudirman - Selindung Baru Pangkalpinang (33117),
Telepon/Fax : (0717) 424524

www.dpp.pangkalpinangkota.go.id Email: dispaper@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 188.4/052/KEP/DISPAPER/III/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor)
18. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian;
 2. menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025;
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 04 Maret 2024

**KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG**



SAMRI, SP, M. Si
Pembina Tk. / IVb
NIP. 197205041993031006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 188.4/052/KEP/DISPAPER/III/2024
TANGGAL : 21 Maret 2024

TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG

No.	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang	Ketua Tim
3.	Kasubbaq PEP dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Ketahanan Pangan	Ketua I Pokja
	a. Kasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
	b. Kasi Konsumsi Pangan	Anggota
	c. Kasi Keamanan Pangan	Anggota
5.	Kabid Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Ketua II Pokja
	a. Kasi Prasarana dan Sarana Penyuluhan	Anggota
	b. Kasi Perbenihan dan Perlindungan	Anggota
	c. Kasi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
6.	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua III Pokja
	a. Kasi Pembibitan dan Produksi	Anggota
	b. Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	c. Kasi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
7.	Kasubbaq Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Ka.UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Ka.UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Ka.UPT Perbibitan	Anggota

**KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG**



SAMRI, SP, M. Si
Pembina Tk. / IVb
NIP. 197205041993031006